

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA HULU
KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

**BIMA NURFADILLA
198520165**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/11/24

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA HULU
KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH

**BIMA NURFADILLA
198520165**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/11/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten
Deli Serdang

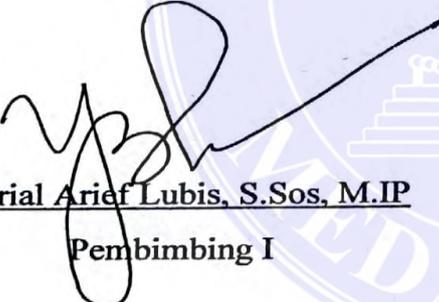
Nama : Bima Nurfadilla

Npm : 198520165

Prodi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik (Isipol)

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP

Pembimbing I


Marlina Deliana, S.AB, M.AB.

Pembimbing II


Dr. Walid Musthafa S, S.Sos., M.IP

Dekan


Dr. Indra Muda, M.AP

Ka.Prodi

Tanggal Lulus : 4 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2024



Bima Nurfadilla
198520165

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Nurfadilla
NPM : 198520165
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2024

Yang menyatakan

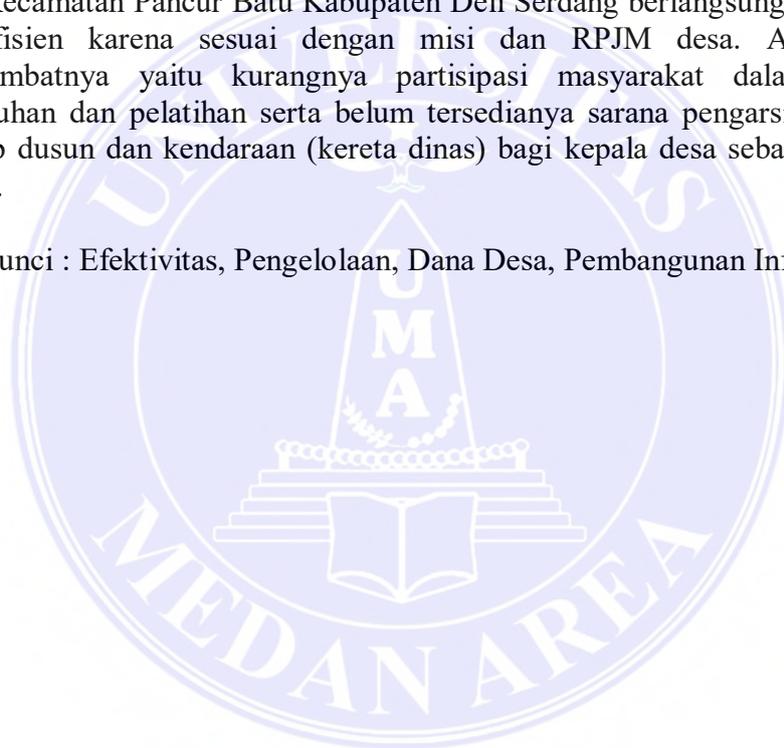


(Bima Nurfadilla)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mempercepat pertumbuhan nasional dengan melakukan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada pembangunan desa yang merupakan tujuan dari pemerintah untuk memerangi ketimpangan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan Sondang P. Siagian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berlangsung sangat efektif dan efisien karena sesuai dengan misi dan RPJM desa. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan serta belum tersedianya sarana pengarsipan dokumen disetiap dusun dan kendaraan (kereta dinas) bagi kepala desa sebagai penunjang kinerja.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur



ABSTRACT

The Indonesian government is currently trying to accelerate national growth by implementing development that focuses on village development, which is the government's aim to combat development inequality. This research aims to determine the effectiveness of village fund management on infrastructure development in Hulu Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency and to describe the inhibiting factors in the effectiveness of village fund management. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques throught interviews, observation, documentation, triangulation and qualitative analysis. The research results show that the effectiveness of village, Pancur Batu Distric, Deli Serdang regency is very effective and efficient because it is in accordance with the village mission and RPJM. The inhibiting factors are the lacj of community participation in taking part in counseling and training the unavailability of facilities for archiving document in each hamlet and vehicles (official trains) for village heads to support performance.

Keywords : Effectiveness, Management, Village Funds, Infrastructure Development

TELAH DIVALIDASI PUSBA UMA SEBAGAI SYARAT BERKAS SIDANG	
TANGGAL	PARAF
23/07/2024	



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bima Nurfadilla. Penulis dilahirkan di Pancur Batu pada tanggal 08 Januari 2001 dari Ayah Sujianto dan Ibu Kusmiani. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan penulis diawali dengan bersekolah di SD Negeri 104221 Pancur Batu dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 penulis lulus dari SMP Swasta Rakyat Pancur Batu. Selanjutnya tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Pancur Batu. Pada tahun 2019 penulis mendaftar kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah pengelolaan dana desa dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP dan Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku pembimbing serta Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Kasuma Candra Wijaya selaku kepala desa hulu dan Bapak Zulkifli selaku sekretaris desa hulu yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, adik, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Bima Nurfadilla

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Efektifitas.....	9
2.1.1 Aspek-Aspek Efektifitas	11
2.1.2 Indikator Efektifitas	12
2.1.3 Pendekatan Untuk Mencapai Efektifitas.....	13
2.2 Pengertian Pengelolaan	14
2.3 Pengertian Dana Desa	16
2.4 Pembangunan Infrastruktur	22
2.5 Pengertian Desa	24
2.6 Penelitian Terdahulu	25
2.7 Kerangka Berfikir	30
III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Waktu Penelitian.....	35
3.4 Informan Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	40

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	43
4.1.1.	Sejarah Desa Hulu	43
4.1.2.	Peta dan Kondisi Desa	44
4.1.3.	Visi dan Misi Desa Hulu	45
4.1.4.	Keadaan Sosial	47
4.1.5.	Struktur Organisasi Kantor Desa Hulu	48
4.1.6.	Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.....	49
4.2.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.....	58
4.3.	Faktor Penghambat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	71
V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Penelitian Terdahulu	25
2	Periode Waktu Penelitian.....	36
3	Informan Penelitian	37
4	Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Hulu.....	47
5	Alokasi Pengelolaan Dana Bidang Pembangunan Desa di Desa Hulu Tahun 2022	67



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1	Kerangka Berpikir.....	33
2	Struktur Organisasi Kantor Desa Hulu.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
1	Pedoman Wawancara	86
2	Surat Izin Penelitian	89
3	Surat Balasan Penelitian	90
4	Dokumentasi Penelitian.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mempercepat pembangunan nasional dengan cara memprioritaskan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pembangunan desa merupakan rencana pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota untuk kepentingan kemajuan negara, desa harus diberikan otonomi seluas-luasnya. Ini berarti memberikan desa kekuatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

Pemerintah melalui kementerian yang menangani desa setiap tahun harus menerbitkan prioritas alokasi dana desa yang digunakan sebagai panduan bagi desa untuk menggunakan anggaran dana desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus memperhatikan tantangan yang dihadapi, potensi yang ada, cita-cita masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memuat anggaran pembangunan khusus untuk pembangunan daerah perdesaan, khususnya berupa anggaran dana desa. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan daerah pedesaan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan uang daerah perlu dilakukan. Agar perencanaan yang dibuat konsisten, maka perencanaan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pembangunan desa juga harus sesuai dengan rencana, dan masyarakat bersama aparat pemerintah berhak untuk mengetahui dan memantau perkembangan pembangunan. Penggunaan uang desa oleh pemerintah harus efisien dan transparan. Kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan uang desa untuk melaksanakan inisiatif yang terencana inilah yang perlu dievaluasi efektifitasnya. Realitanya, dana desa digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan, namun fenomena pengelolaan dana desa yang buruk ini tersebar luas di seluruh tanah air.

Berdasarkan data dari Kementrian Desa, Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Dana Desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa; embung; irigasi; jembatan; pasar desa; fasilitas air bersih; drainase; sumur; serta sejumlah infrastruktur lainnya. Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi

penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit).

Menurut Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan sehingga menjadikan pengelolaan tidak efektif. Permasalahan lain berkaitan dengan perhitungan dan penetapan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Proses penetapan Perkada ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga mengakibatkan penyaluran Dana Desa menjadi terhambat karena belum ada dasar hukumnya.

Terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau malah Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades. Dari 139 aktor, 107 di antaranya merupakan kepala desa. Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Terdapat dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar.

Adapun sejumlah modus korupsi yang dipantau ICW, antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus lainnya meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Modus lainnya itu adalah penggelembungan atau mark up dalam proyek pembangunan infrastruktur desa.

Desa-desanya tersebut tidak disalurkan Dana Desanya sampai dengan adanya kejelasan status hukumnya. Kasus penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa terjadi di beberapa daerah, bahkan banyak yang sudah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib. Kasus-kasus seperti ini yang bisa menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, karena terdapat kebijakan pengenaan sanksi dari Pemerintah berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau penyalahgunaan oleh Kepala Desa.

Permasalahan lain berupa kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa. Pengajuan Dana Desa mempersyaratkan dokumen yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Dokumen tersebut sebagian besar merupakan output dari aplikasi untuk mempermudah pengisian data dan pelaporan Dana Desa. Sehingga, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Desa Hulu mempunyai wilayah yang cukup luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut, namun kemampuan desa dalam mengelola alokasi dana tersebut masih diragukan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi kelemahan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal ini, tidak terlihat secara signifikan pembangunan yang dilakukan terkhusus pada pembangunan fisik atau infrastruktur. Dikarenakan program pembangunan infrastruktur tidak diperbarui oleh pemerintah desa, dikarenakan program masih berupa program lama yang notabene proyek infrastruktur desa tersebut sudah selesai maka perlu diperbarui. Lalu ada masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan yang dimiliki masyarakat yang terkesan sulit dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Lalu ketidakefektifan pengelolaan keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset termasuk regulasi penatausahaan. Inventarisasi belum dimanfaatkan, hingga belum tersedianya petunjuk teknis atau juknis pengawasan pengelolaan dana desa yang komprehensif maupun tematik.

Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun polemik yang terus ada adalah tentang penyimpanan dan berdasarkan pengamatan pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan efektif, hanya saja masih banyaknya anggaran yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan fisik sehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penggarannya. Dan oleh karena itu, penulis tertarik dan tergerak hati untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah di bahas di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pengelolaan dana terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat penelitian yang dapat menjadi kegunaan peneliti dan pembaca dalam memahami masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir penulis dan pembaca dalam memahami dan membahas permasalahan tersebut untuk berguna di kehidupan sosial bernegara.

- b. Dapat menjadi acuan dan pegangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan topik permasalahan ataupun masalah yang berkaitan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dapat menjadi manfaat bagi Pemerintah Desa Hulu untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman pejabat/perangkat desa mengenai efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur serta sebagai kajian bagi pejabat/perangkat desa untuk bekerja lebih baik dan jujur.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk berperan aktif sebagai warga desa dalam pengawasan kegiatan pengelolaan dana desa dan mengajak warga desa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Serta untuk pengembangan diri sebagai modal dalam memasuki dunia kerja.

c. Bagi Pembaca

Dapat menjadi manfaat untuk meningkatkan pemahaman, pengawasan dan kesadaran untuk berpartisipasi dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat ikut andil dalam penentuan pembangunan infrastruktur desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Adapun kriteria yang bisa di gunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001 : 77), yaitu:

1. Tujuan untuk mencapai kemakmuran yaitu dalam setiap upaya atau kegiatan dapat dilakukan dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam mencapai suatu kegiatan dalam setiap organisasi.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apa bila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sigit (2003:2) Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2.1.1 Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Prespektif tersebut dikembangkan oleh Smith (1997:20) ke dalam beberapa indikator yaitu:

1. Keuangan, di ukur dengan indikator : aliran kas, pertumbuhan penjualan
2. Pelanggan, di ukur dengan indikator : penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan.
3. Proses internal dengan indikator : peningkatan teknologi, produktivitas, biaya per unit.
4. Inovasi dengan indikator : waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

2.1.3 Pendekatan Untuk Mencapai Efektivitas

Berdasarkan sudut pandang Martini dan Lubis (1987:56), dapat dilihat perbedaan pendekatan dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan objektif dengan Mengukur tujuan dalam mengukur Efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur efisiensi. tingkat keberhasilan organisasi. . untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengukur seberapa baik organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapainya.
2. Pendekatan pasokan (pendekatan sumber daya sistem) dengan pendekatan sumber mengukur efisiensi melalui keberhasilan organisasi dalam memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkannya dan juga menjaga keandalan sistem organisasi agar berfungsi secara efektif.
3. Pendekatan proses (*internal process approach*) dengan pendekatan proses menganggap efisiensi sebagai keadaan efisiensi internal dan kesehatan organisasi. Dalam pendekatan ini, seseorang tidak memperhatikan lingkungan organisasi, tetapi berfokus pada kegiatan yang dilakukan dengan sumber daya milik organisasi, yang menggambarkan efisiensi dan kesehatan organisasi. Pendekatan proses biasanya digunakan oleh para pendukung pendekatan non-klasik (hubungan manusia) dalam teori organisasi, yang terutama mempelajari hubungan antara efektivitas dan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi

Menurut Gibson (1985: 27-30), Gibson mengkaji konsep efektivitas organisasi dari tiga perspektif, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok dan efektivitas organisasi tahun:

1. Efektivitas Individu.

Dalam perspektif ini, menekankan pemenuhan tugas dan tanggung jawab individu sebagai karyawan suatu organisasi. Keberhasilan pencapaian orang sangat erat kaitannya dengan team work, karena orang yang bekerja di organisasi harus berhubungan langsung dengan kelompok.

2. Efektivitas Kelompok.

Perspektif ini menyoroti kinerja yang dapat diberikan oleh kelompok yang terdiri dari pekerja. Dalam konteks ini individu juga mampu bekerja sama di mana ada tugas yang harus dilakukan sebagai kelompok daripada dilakukan secara individu.

3. Efektivitas Organisasi.

Efektivitas organisasi pada dasarnya berasal dari efektivitas individu dan kelompok. Efisiensi ini dapat melebihi efisiensi total individu dan kelompok, yang berarti organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

2.2 Pengertian Pengelolaan

Menurut KBBI kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695) pengelolaan berasal dari kata kelola. Yang artinya adalah mengendalikan, mengatur, mengkoordinir, memimpin, dan mengusahakan sesuatu supaya lebih baik dan lebih berkembang serta bertanggung jawab secara penuh terhadap sesuatu. Menurut Soewarno Handyaningrat pengelolaan juga bisa

diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat dan dapat dinyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan.
9. Mengadaan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala.
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.3 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber dan mekanisme penyaluran dana desa

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah proses atau prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dcairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tujuan dana desa tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan alokasi dana desa antara lain:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Prioritas dana desa yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
3. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
4. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
5. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

7. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Permendes atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 misalnya, diatur dalam Permendes 13/2020. Kemudian, untuk peraturan dana desa terbaru, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang diatur dalam Permendes 7/2021.

Ada tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 7/2021, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Bentuk pemulihan ekonomi nasional dengan dana desa yaitu terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, prioritas upaya terpadu untuk mencapai tujuan berkelanjutannya dilakukan, antara lain:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Program prioritas nasional di desa yaitu dalam penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dalam pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam di Desa.

Adapun program mitigasi dan penanganan bencana alam serta non alam sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

2.4 Pembangunan Infrastruktur

Siagian (1994:52) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan didefinisikan untuk pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005:35) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988:27) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan – pelayanan yang sama untuk memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

2.5 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Menurut Zakaria dalam Wahyudin Sumpeno, desa adalah gabungan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, serta dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”. Desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan budaya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan desa adalah kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Susunan pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) “pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui Pemerintah Desa dan Badan Permuswaratan Desa (BPD)”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu atau sebelumnya yang dimana dapat dijadikan sumber atau acuan atau tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya sesuai dengan tema atau permasalahan yang saling berkaitan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
I	II	III	IV	V
1	Maijon Kinaro/2019/ Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (<i>Qualitative Methods</i>) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan ini bertujuan mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur yang diukur dengan tiga tolak ukur yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dilaksanakan desa sudah efektif, karena partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar serta transparansi anggaran oleh pemerintah desa kepada masyarakat telah dilakukan sehingga mencapai tujuan dan mendapatkan hasil	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian

Lanjutan Tabel 1

No	Nama/ Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
I	II	III	IV	V
2	Yosua Kevin Rezeki Halawa/2021/ Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Penelitian dekskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variable suatu variable lainnya.	Pengelolaan dan desa tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan target atau sasaran yang telah diharapkan masyarakat, dimana pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 masih banyak pembangunan yang belum tercapai disebabkan dana desa tahun anggaran 2020 digunakan untuk biaya covid-19 dan dana BLT, dengan hal itu pengelolaan dana desa tahun 2020 masih belum maksimal.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian dan perbedaan terletak pada lokasi peneltian.
3	Andini Winarianti/2020/ Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji efektivitas Alokasi Dana Desa. Penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau	Tahapan perencanaan alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat. Kemudian tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian masih kurang efektif,	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian dan perbedaan terletak

Lanjutan Tabel 1

No	Nama/ Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
I	II	III	IV	V
		pendekatan studi kasus.	karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa.	pada lokasi penelitian.
4	Elin Dwi Sintia/2019/ Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian

Lanjutan Tabel 1

No	Nama/ Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
I	II	III	IV	V
			adalah sumber daya manusia dan informasi. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sudah cukup efektif atau cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
5	Murni Yustika/2021/ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di GampongKand eh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya (Studi 2017-2019)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan pertimbangan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa merupakan variabel yang dapat diamati secara langsung	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan pembangunan Fisik di Gampong Kandeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, hal ini terbukti dari indikator efektivitas yang digunakan yaitu pertama indikator pencapaian tujuan menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian

Lanjutan Tabel 1

No	Nama/ Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
I	II	III	IV	V
			di Gampong Kandeh sudah tepat sasaran, kedua indikator Integrasi menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai dana desa, dan ketiga indikator adaptif menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa telah berhasil membangun bangunan fisik yang didanai dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Kandeh.	

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

2.7 Kerangka Berfikir

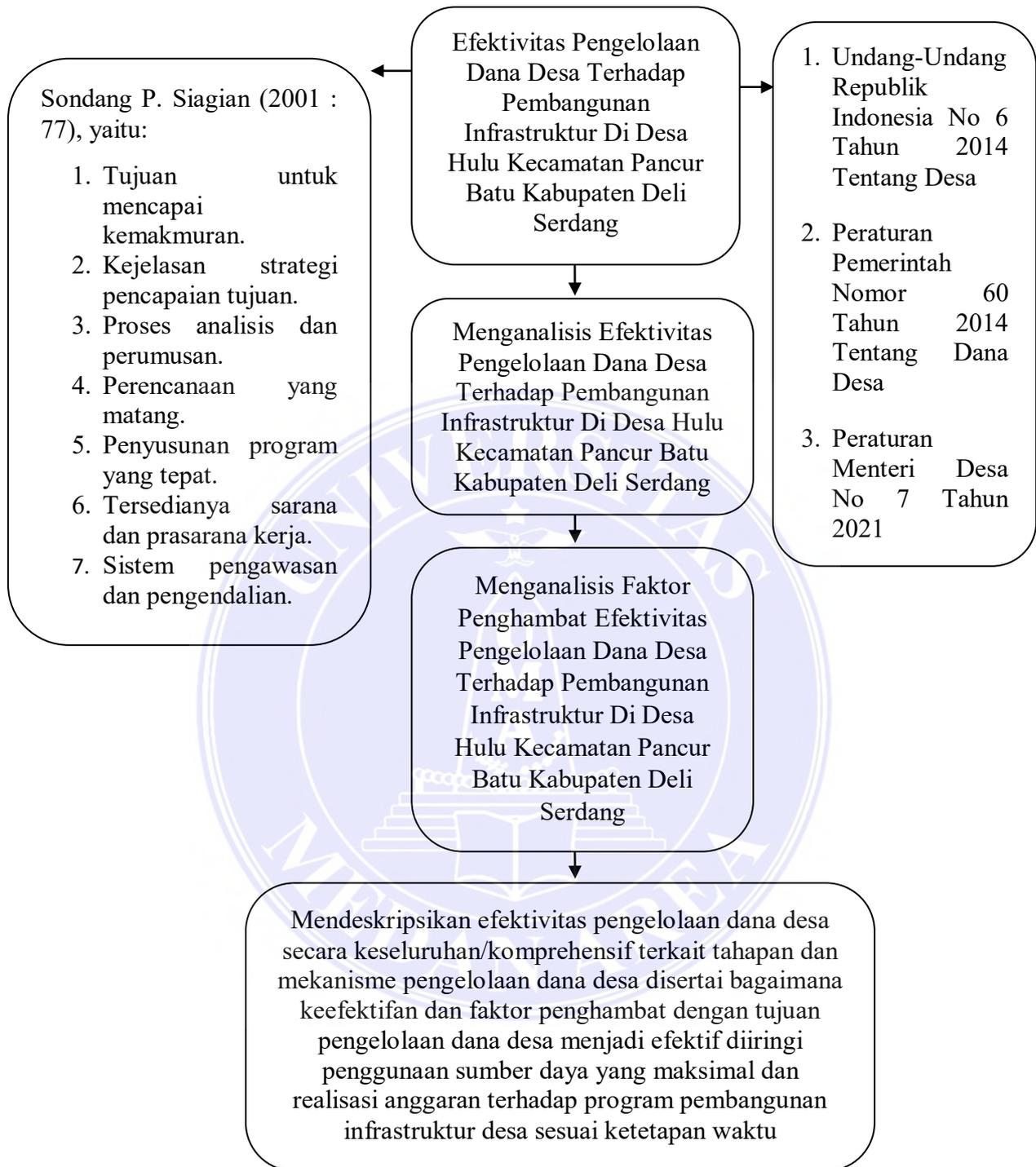
Menurut Dominikus Dolet Unaradjan (2019), kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang diteliti.

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Hal ini juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Desa No 7 tahun 2021. Oleh sebab itu dana desa yang dialokasikan kepada Kabupaten/kota sudah seharusnya jelas didalam pengelolaannya baik itu untuk pembangunan infrastruktur desa maupun untuk sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus jelas dan diperincikan setiap pengeluarannya karena laporan yang akan diberikan kepada Pemerintah harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan laporan. Selain itu pengelolaan juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengendalikan, mengatur, mengkoordinir, memimpin, dan mengusahakan sesuatu supaya lebih baik dan lebih berkembang serta bertanggung jawab secara penuh terhadap sesuatu yang dihasilkan. Pengelolaan yang maksimal dan efisien dapat meningkatkan efektivitas suatu tujuan dari organisasi karena efektivitas merupakan keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Selain itu efektivitas juga merupakan tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi

yang telah ditetapkan, sehingga dibutuhkan berbagai indikator dalam pencapaian tujuan organisasi seperti tujuan pengelolaan dana, kejelasan dana tersebut untuk apa, proses kerja yang sedang berlangsung, perencanaan yang sudah ditetapkan, penyusunan program kerja, tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sistem pengawasan dan pengendalian dari suatu desa.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak segampang yang dipikirkan karena pasti ada faktor penghambat yang akan terjadi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena dalam pengelolaan dana desa seringkali terjadi kesalahpahaman dalam penyusunan laporan akhir, sehingga menyebabkan pengelolaan dana pembangunan tersebut tidak efektif dan tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hal inilah sehingga pengelolaan dana tersebut harus ditindaklanjuti secara bertahap agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah :



Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan ter gali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi lima tipe utama, yaitu: *phenomenology*, *ethnography*, *case study research*, *groundedtheory*, dan *historical research*.

Herdiansyah (2011:76) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah –

masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu). Pertimbangan dalam menggabungkan kedua rancangan penelitian tersebut mengacu pada pendapat yang menyatakan penelitian studi kasus dapat digabung dengan model – model atau rancangan penelitian yang lain, seperti etnografi dan fenomenologi. Penggabungan rancangan studi kasus dengan rancangan fenomenologi dikarenakan penelitian ini memiliki hubungan dengan esensi pengalaman seseorang terkait suatu fenomena.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kantor Desa Hulu. Terletak pada Jalan Persatuan Dusun III Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Desa Hulu berjarak 2 km dari pusat Kecamatan Pancur Batu, terletak di posisi Jalan Jamin Ginting Km 18.

3.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian dan rangkaian kegiatan penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun jadwal pada periode waktu sebagai berikut :

Tabel 2. Periode Waktu Penelitian

No	Daftar Kegiatan	2022	2023						2024		
		Nov	Jun	Jul	Agu	Sep	Ok	Nov	Mei	Jun	Agu
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■							
3	Seminar Proposal				■						
4	Revisi Proposal					■					
5	Pengambilan data/Riset						■				
6	Penyusunan Skripsi							■			
7	Seminar Hasil								■		
8	Revisi Skripsi									■	
9	Sidang Meja Hijau										■

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu maupun kelompok yang bisa memberikan informasi, dimana yang diperoleh dari informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan Informan menggunakan metode *snowball sampling* dengan Kepala Desa Hulu sebagai informan kunci dan membantu mengembangkan atau mangajukan bawahannya yaitu perangkat desa sebagai informan lain sesuai keahlian dan jabatannya. Dalam mengklasifikasikan Informan Penelitian yang digunakan dalam pemilihan informan adalah pejabat atau perangkat desa di Kantor Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Maka dapat di klasifikasi menjadi tiga jenis Informan Penelitian yaitu:

1. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informan yang berwibawa dan memiliki pengaruh sehingga dipercaya dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ada Kepala Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

2. Informan Utama

Informan Utama adalah individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial terkait objek yang sedang diteliti. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Kantor Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder terkait masalah penelitian, informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi pelengkap untuk ditambahkan didalam analisis penelitian. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Bendahara Desa, Kepala Dusun III, dan Kepala Dusun V Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kusuma Candra Wijaya	Kepala Desa Hulu	Informan Kunci
2	Zulkifli	Sekretaris Desa Hulu	Informan Utama
3	Rulung Ruliana	Bendahara Desa Hulu	Informan Utama
4	Rinaldi	Kepala Dusun III	Informan Tambahan
5	Rafliansyah	Warga Dusun III	Informan Tambahan
6	Lintar	Warga Dusun II	Informan Tambahan

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah empat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014:372). Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata dan dibantu dengan pancaindera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014:382).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014:377). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-

lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

4. Triangulasi

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330). Menurut Patton ada empat macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian diantaranya: Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji (Moleong, 2005:331)

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pemindahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Teknik analisis data adalah proses pemindahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan digunakan.

Analisis data dilakukan dengan tujuan membuat informasi yang disembunyikan menjadi jelas dan eksplisit. Berdasarkan penelitian tersebut, teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model kuantitatif. Menurut Miles dan Huberman, yang mengidentifikasi tiga aspek mendasar sebagai berikut (Miles & Huberman, 1992:15):

Proses data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Data sebagai catatan lapangan, yang memiliki dua bagian, deskripsi dan refleksi, digunakan untuk menangkap informasi yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumen. Pengamatan peneliti dicatat dalam catatan deskripsi, yaitu fakta alam yang belum diolah yang tidak menyertakan interpretasi atau pendapat peneliti atas kejadian yang ditemuinya. Sementara itu, catatan refleksi berfungsi sebagai sumber untuk rencana pengumpulan data tahap berikutnya dengan memuat kesan, komentar, dan interpretasi peneliti terhadap temuan.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan prosedur, dan perubahan data yang belum diproses yang dihasilkan dari catatan tertulis terkait pekerjaan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Cara terbaik untuk memadatkan data adalah memilih apa yang akan dimasukkan, meringkas atau mendeskripsikannya secara singkat, mengelompokkannya menjadi pola menggunakan transkrip penelitian, dan kemudian mengaturnya sehingga mudah untuk menarik kesimpulan dan kesimpulan tersebut relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam

penelitian kualitatif, istilah “reduksi data” dan “pengelolaan data” (dimulai dengan editing, coding, dan diakhiri dengan tabulasi data) dapat dipertukarkan. Ini memerlukan tindakan untuk menemukan hasil pengumpulan data yang paling komprehensif dan mengelompokkannya ke dalam konsep atau topik tertentu (Burhan Bungin, 2003:70).

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi karena sekelompok informan berkumpul, memungkinkan untuk inferensi dan kemungkinan tindakan. Penyajian materi cenderung menghasilkan pembagian data yang kompleks menjadi bagian-bagian yang mendasar dan terfokus agar lebih mudah dipahami. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memudahkan peneliti berbagi data yang telah mereka analisis.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam pembuatan laporan adalah kesimpulan. Untuk memahami sesuatu, makna, keteraturan pola penjelas, alur kausal, atau proposisi, seseorang harus menarik kesimpulan. Verifikasi kesimpulan dilakukan dengan memeriksa dan menantang pengetahuan yang lebih tepat. Dengan melihat catatan lapangan, termasuk salinan penemuan dalam data, dan memanfaatkan teknik validitas. Menarik kesimpulan adalah prosedur yang memerlukan pemikiran yang cermat karena peneliti harus menghindari penarikan kesimpulan yang salah dari fakta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan relevansi terhadap teori yang digunakan yaitu pemerintah desa berupaya dalam pemberdayaan masyarakat seperti mensubsidi UMKM, memaksimalkan BUMDes, pelatihan ketrampilan, dan bantuan sosial. Kedua yaitu visi misi desa, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, penyusunan program desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketiga perumusan dan penyusunan RPJMDes oleh pemerintah desa dengan lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat. Keempat proses perumusan RPJMDes dengan waktu maksimal 6 bulan dan penyusunan RKPDes setiap tahunnya. Kelima penyusunan program yang terdapat dalam RPJMDes dan RKP tahunan berupa program prioritas desa pembangunan infrastruktur desa. Keenam sarana dan prasarana kantor desa yang baik, perabotan dan peralatan yang lengkap, terdapat balai desa yang luas sebagai sarana rapat dan kegiatan desa, pengadaan 7 laptop dan 2 printer, ATK yang lengkap serta inventaris. Ketujuh pengelolaan dana desa diawasi oleh oleh BPD dan LPMD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kalau dari atas itu ada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten, Camat atau Kecamatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Faktor penghambat dalam efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yaitu antara lain rakyat kurang makmur secara finansial, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa dengan masyarakat dalam proses penyusunan program, masyarakat tidak benar-benar memahami strategi tersebut, masyarakat ataupun tokoh masyarakat tidak dapat memenuhi undangan rapat, perangkat desa yang belum paham dalam penggunaan perangkat TIK seperti komputer dan laptop, belum tersedianya sarana pengarsipan dokumen disetiap dusun, ketiadaan kendaraan (kereta dinas), terakhir terkait pembebasan lahan dari warga.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat beberapa saran mengenai efektivitas pengelolaan dana desa yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Desa

Sebaiknya pemerintahan desa mempertahankan kinerjanya yang cukup baik dalam mengelola dana desa seperti mengelola dana desa secara tepat dan tanggap terhadap perubahan yang berkaitan dengan kemakmuran desa dan masyarakatnya.

2. Bagi Masyarakat Desa

Bagi masyarakat sebaiknya tetap menjaga solidaritas antara anggota masyarakat dan saling bergotong royong dalam membangun desa untuk menciptakan desa yang makmur dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chairi, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M, & Donelly, J.Jr. (1985). Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, dan Proses. Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley& Sons.
- Herdiansyah, Haris. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Bandung : Salemba Empat
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lubis, H. & Martini, H. (1987). Teori Organisasi. Bandung : Ghalia Indonesia
- Miles, M. B. &Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy j. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Cet.4
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek – Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. PT Elek Media Kompotindo
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta. Erlangga
- Salim, P. Salim, Y. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta : Modern English Press
- Smith, Malcolm. (1997). *Measuring Organizational Effectiveness, Management Accounting*. Oktober
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta.*

Soehardi, Sigit. 2003. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: BPFE UST.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung: Alfabeta, Cet.15

Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan Research dan Development . Bandung : Alfabeta.

Tikson ,T, Deddy. 2005. Administrasi Pembangunan. Makassar : Gemilang Persada

Unaradjan, D.D. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019)

Yusuf, A. M. (2014). Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Marvianto, R.P, H.S, Soekarno & Wahyono, M. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Mojogede Kec Balong Panggang Kab Gresik). *Jurnal Administrasi Negara. Vol 1. 1-9.*

Irmansyah, Mustafa S.W & Hamid R.S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol 4. No 2.*

Skripsi:

Aidi, M.S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau.

Damayanti, E. (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Beruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Riduwan, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Skripsi Fisip, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2021

Situs

Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. (2019). Diakses pada 1 Mei 2023 dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>

Redaksi KPPN BKT. (2021). Dana Desa. djp.kemendesa.go.id. Diakses pada 31 Maret 2023 dari <https://djp.kemendesa.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Dana Desa. (2022). Diakses pada 5 Mei 2023 dari <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund>



Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA HULU
KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN
DELI SERDANG**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Tujuan untuk mencapai kemakmuran.	<p>Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang menjadi program pemerintah desa untuk mencapai kemakmuran di desa ini? b. Apa yang menjadi program desa dalam pembangunan infrastruktur desa? c. Apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat? <p>Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program-program apa saja yang sudah terlaksana dalam pencapaian kemakmuran desa ? b. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran desa tersebut? c. Apakah dana desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemakmuran warga desa?
2	Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan	<p>Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi apa saja yang digunakan dalam pengelolaan dana desa ? b. Apakah pencapaian tujuan yang diharapkan sudah sesuai dengan strategi yang digunakan? khususnya dalam mengelola dana desa. c. Apa yang menjadi hambatan dalam penetapan strategi pembangunan desa? <p>Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi apa yang digunakan agar pengelolaan dana desa itu jelas dan transparan? b. Apakah strategi pencapaian dana desa jelas terperinci dalam pencapaian tujuan?
3	Proses Analisis Dan	<p>Informan Kunci</p>

	Perumusan	<p>a. Bagaimana proses perumusan RPJMDes yang dilaksanakan pemerintah desa?</p> <p>b. Bersama pemerintah desa, pihak mana saja yang terlibat dalam proses perumusan program desa?</p> <p>c. Apa yang menjadi hambatan dalam proses perumusan program desa?</p> <p>Informan Utama</p> <p>a. Apakah masyarakat terlibat dalam proses perumusan program desa?</p> <p>b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan program desa?</p> <p>c. Bagaimana komunikasi dan kordinasi pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam merumuskan program desa?</p>
4	Perencanaan Yang Matang	<p>Informan Kunci</p> <p>a. Apakah perencanaan program dalam pengelolaan dana desa sudah direncanakan secara matang?</p> <p>b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur desa?</p> <p>c. Apa yang menjadi hambatan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur?</p> <p>Informan Utama</p> <p>a. Dana yang direncanakan dalam setiap masing-masing program apakah sesuai budget atau lebih dari budget yang ditetapkan?</p> <p>b. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa?</p>
5	Penyusunan Program Yang Tepat	<p>Informan Kunci</p> <p>a. Bagaimana proses penyusunan program pembangunan infrastruktur desa?</p> <p>b. Program pembangunan infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas desa?</p> <p>c. Apa yang menjadi hambatan dalam proses penyusunan program pembangunan infrastruktur desa?</p> <p>Informan Utama</p> <p>a. Apakah penyusunan laporan program mengenai dana desa sudah tepat?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Apakah penyusunan program sesuai dengan hasil yang diharapkan khususnya dalam mengelola dana desa? c. Apakah penyusunan laporan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa sudah tepat?
6	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja	<p>Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam pembangunan infrastruktur desa apakah sarana dan prasaran kerja terpenuhi? b. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah terpenuhi tersebut? c. Apa yang menjadi kekurangan atau hambatan dalam sarana dan prasarana yang digunakan dalam mengelola dana desa? <p>Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur desa sangat besar? b. Bagaimana aparat desa mengatasi pengelolaan dana jika dana yang dikeluarkan cukup besar?
7	Sistem Pengawasan Dan Pengendalian	<p>Informan Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur? b. Siapa saja yang menjadi pihak dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di desa? c. Apa yang menjadi hambatan dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur? <p>Informan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur desa? b. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan tersebut?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 543 /FIS.2/01.10/VIII/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

23 Agustus 2023

Yth,
Kepala Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Bima Nurfadilla
N P M : 198520165
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**, dengan judul Skripsi "*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. E. M. J. Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PANCUR BATU
DESA HULU**

Alamat : Jl.Pahlawan Dusun III Desa Hulu Kode Pos 20353

SURAT KETERANGAN SELESAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nomor : 145/759.1/DII/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASUMA CANDRA WIJAYA

Jabatan : KEPALA DESA HULU

Menyatakan bahwa yang beridentitas di bawah ini :

Nama : Bima Nurfadilla

NPM : 198520165

Program Studi : Administrasi Publik

Tempat PKL : Kantor Desa Hulu

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang , dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2023 sesuai dengan surat permohonan dari Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama melaksanakan kegiatan Pengambilan Data/riset di instansi kami, peserta sangat antusias dan dapat menjalankan tugas-tugas yang kami berikan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan .

Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Desa Hulu, 25 Oktober 2023

KEPALA DESA HULU



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Kantor Desa Hulu



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Hulu



Gambar 3. Pendapatan APBDes 2023



LAPORAN REALISASI APBD DESA HULU KEC. PANCUR BATU TAHUN 2022

I. PENDAPATAN		PAGU	Ket.
1. PAD			
2. DANA DESA		815.287.000	
3. BHPR		184.369.000	
4. ALOKASI DANA DESA		409.879.000	
5. DAN LAIN LAIN		18.048.500	
JUMLAH TOTAL		1.427.583.500	

II. BELANJA			
URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
BIDANG PENYELENGGARAN PEMDES			
Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat	377.700.000	377.700.000	100
BPJS Ketenaga kerjaan Kades dan Perangkat/BPD	33.281.496	33.281.496	100
Pencatatan Administrasi Kependudukan	716.500	716.500	100
Operasional Perkantoran	68.582.000	68.272.000	100
Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	100
Operasional BPD	1.678.000	1.678.000	100
Dukungan biaya Pilkades	21.706.104	21.706.104	100
Rehap Ruang Kades dan Balai Desa	27.400.400	27.225.400	100
TOTAL	589.864.500	589.379.500	100
BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
Bidang Pendidikan	43.800.000	41.800.000	100
Bidang Kesehatan	47.568.500	47.568.500	100
Rehap Dinding Sebelah Drainase Jl. Sekolah Dusun II	40.555.000	40.555.000	100
Pembangunan Drainase Jalan ABRI Dusun II	21.512.000	21.512.000	100
Pembangunan Drainase Jalan ABRI Ujung A Dusun III	42.449.000	42.449.000	100
Pemasangan Paving Block Jalan ABRI Ujung A Dusun III	47.291.000	47.291.000	100
Penghijauan/Pengadaan Bibit Kasturi	1.800.000	1.800.000	100
Komenkasi dan Informatika /WIFI	7.800.000	7.800.000	100
TOTAL	252.775.500	250.775.500	100
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Oprasional LPM	7.200.000	7.200.000	100
Peringatan HUT RI	10.000.000	10.000.000	100
Pelatihan TPK 3 PKK	10.500.000	10.500.000	100
Perjalanan Dinas PKK	1.080.000	840.000	77
Pengadaan Monografi PKK dan Buku 6 PKK	12.265.000	7.265.000	59
Operasional PKK	7.925.500	7.895.000	100
Senam Lansia	5.000.000	5.000.000	100
ABK	1.000.000	1.000.000	100
TOTAL	54.970.500	49.700.000	90
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Bimtek / Pelatihan Kepala Desa & Perangkat, BPD dan Masyarakat	91.000.000	83.820.000	92
Ketahanan Pangan	46.150.040	46.150.000	100
TOTAL	137.150.040	129.970.000	94
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
BLT Desa 91 kk x Rp 300.000 x 12 bulan	327.600.000	327.600.000	100
Ops Tim Relawan & Peralatan	65.222.960	65.222.900	100
TOTAL	392.822.960	392.822.900	100
JUMLAH TOTAL	1.427.583.500	1.412.647.900	
SILPA TAHUN 2022		14.935.600	

Gambar 4. Pengelolaan Dana dan Realisasinya



Gambar 5. Pembangunan Drainase Aliran Air



Gambar 6. Paving Block Jalan



Gambar 7. Wawancara dengan Sekretaris Desa Hulu



Gambar 7. Wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Hulu